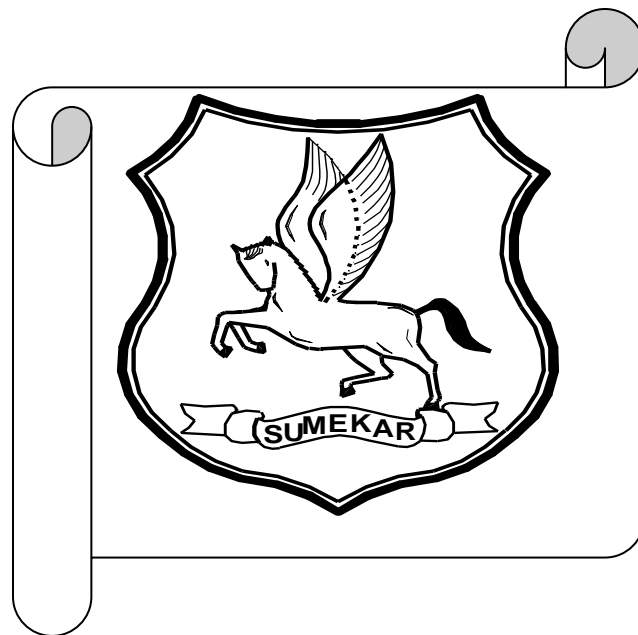


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPSTP Kabupaten Sumenep periode 2022 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2023.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Sumenep, Maret 2022

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP



DR. R. ABD. RAHMAN RIYADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	83
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	86
	2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat	102
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	110
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	110
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	110
	3.3. Program dan Kegiatan	1113
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	128
BAB V	PENUTUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021	10
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2021	12
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan	17
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Sumenep	32
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	60
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sumenep	87
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sumenep	102
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA	111
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sumenep	114
Tabel 4.1	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojkerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10).
24. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketanagakerjaan
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu Tahun 2021 dan prakiraan capaian tahun berjalan

Tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2021. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

terdiri dari 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 166,31% (per 31 Desember 2021).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

terdiri dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021 sebesar **3.315.024.180,-** atau **92,87 %** dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021 Urusan Penanaman Modal

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2021	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
	BELANJA PEGAWAI	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
I	Gaji dan Tunjangan	2.257.949.310	2.157.336.677	95,54
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.752.444.093	1.690.708.000	96,48
2	Tunjangan Keluarga	180.788.363	164.099.800	90,77
3	Tunjangan Jabatan	157.634.750	148.170.000	94,00
4	Tunjangan Fungsional Umum	55.999.833	53.715.000	95,92
5	Tunjangan Beras	106.140.859	96.173.760	90,61
6	Tunjangan PPh	4.916.357	4.449.538	90,50
7	Pembulatan Gaji	25.055	20.579	82,14

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2021	Realisasi Keuangan SPJ	%
II	Tambahan Penghasilan ASN	1.166.068.912	1.021.912.502	87,64
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.166.068.912	1.021.912.502	87,64
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.343.750	127.187.501	93,28
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.843.750	19.837.501	95,17
2	Honorarium	115.500.000	107.350.000	92,94
IV	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	6.468.750	6.000.000	92,75
1	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	6.468.750	6.000.000	92,75
V	Jasa	2.587.500	2.587.500	100,00
1	Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.587.500	2.587.500	100,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021 Urusan Ketenagakerjaan

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2021	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.176.768.961	3.413.977.300	81,73
	BELANJA PEGAWAI	4.176.768.961	3.413.977.300	81,73
I	Gaji dan Tunjangan	2.585.664.444	2.318.199.467	89,67
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.955.901.905	1.836.896.368	93,91
2	Tunjangan Keluarga	234.382.213	171.998.740	73,38
3	Tunjangan Jabatan	181.599.250	138.110.000	76,05
4	Tunjangan Fungsional Umum	67.066.750	58.635.000	87,42
5	Tunjangan Beras	137.907.135	104.574.480	75,82

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2021	Realisasi Keuangan SPJ	%
6	Tunjangan PPh	8.771.446	7.962.747	90,78
7	Pembulatan Gaji	35.745	22.132	61,91
II	Tambahan Penghasilan PNS	1.591.104.517	1.095.777.833	68,82
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.472.604.517	991.977.833	67,36
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja	118.500.000	103.800.000	87,59
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.176.768.961	3.413.977.300	81,73

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 6 Program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.122.165.862,-** realisasi belanja **Rp. 1.964.951.665,- (92,59%)**
2. Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 17.435.190.784,-** realisasi belanja **Rp. 17.266.958.370,- (99,03%)**

Tabel 2.2
Belanja Langsung TA. 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	2.122.165.862	1.964.951.665	92,59
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	989.984.470	958.322.014	96,80
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.809.960	3.802.000	99,79
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.809.960	3.802.000	99,79
I.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.155.440	58.980.850	96,44
I.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.535.440	18.357.850	99,04
I.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.620.000	40.623.000	95,31
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.121.540	73.340.335	85,16
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.977.420	3.098.000	77,89

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Bangunan Kantor			
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.533.480	3.803.500	83,90
I.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.025.260	17.213.800	81,87
I.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.457.120	11.456.500	99,99
I.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.461.500	9.210.000	63,69
I.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.978.000	21.012.725	91,45
I.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.688.760	7.545.810	98,14
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.289.232	233.543.360	99,26
I.4.1	Pengadaan Mebel	146.822.280	145.198.200	98,89
I.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.466.952	88.345.160	99,86
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.499.900	268.303.954	97,74
I.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.028.600	987.500	32,61
I.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.056.000	145.071.254	97,33
I.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.415.300	122.245.200	99,86
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.108.398	320.351.515	97,34
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.250.000	35.131.315	89,51
I.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.600.000	6.430.000	60,66
I.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.258.398	278.790.200	99,83
	URUSAN PENANAMAN MODAL	1.132.181.392	1.006.629.651	88,91
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	111.155.400	107.603.240	96,80
II.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	111.155.400	107.603.240	96,80
II.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	111.155.400	107.603.240	96,80
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	139.609.940	130.600.980	93,55
III.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	139.609.940	130.600.980	93,55
III.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	139.609.940	130.600.980	93,55

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	487.306.176	437.561.725	89,79
IV.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	487.306.176	437.561.725	89,79
IV.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	440.191.560	401.942.939	91,31
IV.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	41.346.116	30.385.186	73,49
IV.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.768.500	5.233.600	90,73
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.167.176	311.363.706	83,66
V.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.167.176	311.363.706	83,66
V.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.621.860	36.452.000	72,01
V.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.261.516	190.126.706	83,66
V.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.283.800	84.785.000	89,93
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.942.700	19.500.000	88,87
VI.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.942.700	19.500.000	88,87
VI.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.942.700	19.500.000	88,87
	URUSAN KETENAGAKERJAAN	22.089.041.471	20.717.797.361	93,79%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.363.135.374	4.077.619.501	76,03%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.880	320.880	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.476.768.961	3.413.977.300	76,26%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.476.768.961	3.413.977.300	76,26%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.868.800	16.796.000	67,54%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.868.800	16.796.000	67,54%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.866.088	278.770.882	66,55%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.863.636	11.016.210	85,64%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.465.284	69.224.848	95,53%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.141.283	123.075.104	85,98%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.296.485	8.071.720	86,83%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.900.000	2.470.000	5,05%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.370.000	49.986.000	45,70%
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.829.400	14.927.000	65,38%
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.923.280	36.925.200	86,03%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.923.280	36.925.200	86,03%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.821.860	177.967.681	77,44%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	883.500	660.000	74,70%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.205.120	53.702.837	51,05%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.733.240	123.604.844	99,90%
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.565.505	152.861.558	90,15%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.044.000	54.672.108	82,78%
22	Pemeliharaan Mebel	19.552.500	19.251.500	98,46%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.956.000	16.032.150	76,50%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.013.005	62.905.800	99,83%
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	709.282.267	626.780.510	88,37%
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	604.887.207	531.999.890	87,95%
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.197.275	49.450.160	94,74%
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.197.275	49.450.160	94,74%
4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	52.197.785	45.330.460	86,84%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	52.197.785	45.330.460	86,84%
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	16.431.941.966	16.391.978.500	99,76%
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Perluasan Kesempatan Kerja	13.279.969.700	13.279.969.700	100,00%
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.041.374.940	3.026.493.500	99,51%
3	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	74.999.932	61.820.200	82,43%
4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	74.999.932	61.820.200	82,43%
5	Peningkatan Pelindungan dan Komtetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	35.597.394	23.695.100	66,56%
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	35.597.394	23.695.100	66,56%
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	241.019.677	219.515.760	91,08%
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	48.336.008	43.131.770	89,23%
3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.040.968	44.498.930	92,63%
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	48.361.808	45.698.570	94,49%
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	96.280.893	86.186.490	89,52%
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.944.454	28.683.600	54,18%

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran (88,30%).

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota								
1	Prencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
1	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	3.809.960,00	3.802.000,00		
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	32	32	3.569.418,22	3.315.024,18		
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	54	54	18.535,44	18.357,85		
2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	5	5	42.620.000	40.623,00		
4	Program Administrasi umum Perangkat daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan komponen listrik yang disediakan	item	7	7	3.977.420,00	3.098.000,00		

2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	13	12	4.533.480,00	3.803.800,00	Peralatan dan perlengkapan kantor disediakan sesuai kebutuhan kantor	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya ATK dan tersedianya mamin rapat	item	19	17	21.028.200,00	17.213.800,00	Ketersediaan ATK dan Mamin Rapat menyesuaikan Kebutuhan Kantor	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang diadakan	item	5	5	11.467.120,00	11.456.500,00		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan perundangan yang disediakan	exemplar	736	546	14.461.500,00	9.210.000,00	Terpenuhinya Jasa Surat Kabar namun permintaan jasa iklan yang minim	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
6	Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Luar Daerah)	Kali	6	6	17.398.000,00	15.572.725,00		
		Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Dalam Daerah)	Kali	27	27	5.580.000,00	5.440.000,00		
7	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah meter lari arsip yang disediakan	meter	6	6	7.688.760,00	7.545.810,00		
8	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
1	Pengadaan mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli meja kerja pejabat	Unit	1	1	16.940.880,00	16.500.00,00		
		Jumlah mebeleur yang dibelikursi kerja pejabat	Unit	1	1	3.590.400,00	3.500.00,00		
		Jumlah mebeleur yang dibeli kursi rapat pejabat	Unit	1	1	5.771.700,00	5.700.000,00		
		Jumlah mebeleur yang dibeli kursi rapat staff	Unit	49	49	67.861.239,88	67.861.239,88		
		Jumlah mebeleur yang dibeli meja kantor	Unit	15	15	42.204.970,50	42.204.970,50		
		Jumlah mebeleur yang dibeli meja rapat	Unit	4	4	9.431.989,62	9.431.989,62		

		2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya							
				Jumlah peralatan yang disediakan mesin absensi	Unit	1	1	7.135.392	7.100.000	
				Jumlah peralatan yang disediakan mesin alat pendingin	Unit	1	1	27.086.400	27.000.000	
				Jumlah peralatan yang disediakan bracket stands tv	Unit	1	1	768.000	768.000	
				Jumlah peralatan yang disediakan mesin komputer	Unit	2	2	25.949.880	25.949.880	
				Jumlah peralatan yang disediakan mesin printer komputer	Unit	2	2	9.667.680	9.667.680	
				Jumlah peralatan yang disediakan TV	Unit	1	1	17.859.600	17.859.600	
	9		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2187	712	3.028.600,00	967.500,00	Capaian Realsasi Kinerja belum tercapai karena tersedianya surat menyurat menggunakan via email, chating whatsapp dan soft copy
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	149.056.000	148.071.254	
		3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya Tenaga kerja Non ASN	orang	10	10	122.415.300	122.245.200	
		4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah							
		5	penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinss operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	16	16	39.250.000	35.131.315	

	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	20	20	10.600.000	6.430.000		
	7	Pemeliharaan rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luasan gedung yang di rehab/ dipelihara	M2	1666,6	1666,6	279.258.398	278.790.200		
	8	Program pengembangan iklim penanaman modal								
	9	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Obyek	2	2	111.155.400	107.603.240		
5		Program Promosi penanaman modal								
	1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regonal / Nasional	Kegiatan	1	1	139.609.940	130.600.980		
6		Program pelayanan penanaman modal								
	1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Berkas Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	5206	9606	440.191.560	401.942.939		
	2	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Pelaku usaha	4993	9606	41.346.116	30.385.186		
	3	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	Pengaduan	9	9	5.768.500	5.233.600		
7		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal								
	1	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Dokumen	7	7	50.621.860	36.452.000		
	2	koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	216	216	227.261.516	190.126.706		

	3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	dokumen	13	13	94.283.800	84.788.000		
8		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal								
	1	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi	Dokumen	54	54	21.942.700	19.500.000		
		URUSAN KETENAGAKERJAAN								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	4	4	320.880	320.880		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Tahun	1	1	4.176.768.961	3.413.977.300		
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	Stel	40	38	24.868.800	16.796.000	Realisasi kinerja tidak tercapai karena menyesuaikan banyaknya jumlah ASN yang ada	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Listrik untuk kebutuhan kantor	Macam	13	13	12.863.636	11.016.210		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Item	24	24	72.465.284	69.224.848		
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan,	Macam Orang	45	45	143.141.283	123.075.104		
			Jumlah tenaga administrasi,	Kotak	15	15				
			Jumlah tersedianya makan dan Minuman untuk Rapat		760	760				
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah item yang dicetak	Item	4	4	9.296.485	8.071.720		
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Macam	2	2	48.900.000	2.470.000	Realisasi Kinerja tercapai, namun kegiatan pameran tidak dapat dilaksanakan karena masih adanya Pandemi Covid-19	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	75	50	109.370.000	49.986.000	Realisasi kegiatan tidak tercapai dikarenakan minimnya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Disnaker Prov. Jatim	
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah meter lari arsip yang dikelola	Bulan	12	12	22.829.400	14.927.000		

	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Macam	4	4	42.923.280	36.925.200		
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang di Administrasikan	Surat	1000	900	883.500	660.000	Realsasi Kinerja belum tercapai karena tersedianya surat menyurat menggunakan via email, chatting whatsapp dan soft copy	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penggunaan Kebutuhan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	105.205.120	53.702.837		
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan tenaga outsourcing kantor selama 1 tahun	Orang	7	7	123.733.240	123.604.844		
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase	100	100	169.565.505	152.861.558		
	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	18	18	66.044.000	54.672.108		
	6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Meubelair yang dipelihara	Meter	75	75	19.552.500	19.251.500		

	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	46	40	20.956.000	16.032.150		
	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah area gedung kantor/rumah dinas yang dipelihara	M ²	450	450	63.013.005	62.905.800		
2		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	120	120	604.887.207	531.999.890		
1		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga kerja swasta	LPK	38	38	52.197.275	49.450.160		
2		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	Orang	85	85				
3		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah penerima manfaat	Kelompok	125	125	13.279.969.700	13.279.969.700		
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penerima manfaat	Kelompok	25	25	3.041.374.940	3.026.493.500		

1		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Pencaker	750	750	74.999.932	61.820.200		
2		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
	1	Peningkatan Pelindungan dan Komtetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	Orang	60	60	35.597.394	23.695.100		
4		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah terselenggaranya pengesahan peraturan perusahaan	Perusahaan	20	20	48.336.008	43.131.770		
	2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah terdapatnya sarana hubungan industrial dan jamsos yang melaksanakan kegiatan	Perusahaan	20	20	48.040.968	44.498.930		

		3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang ditangani	Perusahaan	20	20	48.361.808	45.698.570		
		4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang bekerjasama	Perusahaan	20	20	96.280.893	86.186.490		
5			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
		1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan dan pemberdayaan transmigrasi	KK	2	2	52.944.454	28.683.600		

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 10 (Sepuluh) Program, 41 (empat puluh satu) kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 34.359.189.635,00. Diharapkan pada tahun 2022 keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.

- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
- 2. Lapangan Kerja yang Rendah.
- 3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f) Adanya refocusing sampai 50,00% untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS).
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Penguasaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Memperbaiki sistem pengupahan.
4. Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.
5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

7. Mengembangkan Sektor Informal.
8. Program Transmigrasi.
9. Peningkatan Investasi.

2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel T-C.29 di bawah ini.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				100,00	89,77	19,49	46,60	239,02	20,00	156,37	156,37			
2	18	01													
2	18	01													
2	18	01	2	01											
2	18	01	2	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan sarana dan prasarana perkantoran	100,00	65,48	24,33	24,23	99,61	20,00	36,57	36,57
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu	100,00	88,69	40,40	43,53	107,74	20,00	50,74	50,74
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91	66	18	18	100,00	3	87	95,60

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	24	16	4	4	100,00	4	24	100,00
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	16	4	4	100,00	4	24	100,00
2	18	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi Birokrasi	90,00	89,94	80,00	89,99	112,49	90,00	89,98	99,97
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100,00	73,33	21,11	21,11	100,00	20,00	114,44	100,00
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	392	288	32	32	100,00	72	392	100,00
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	48	24	12	12	100,00	12	48	100,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Kepegawaian SKPD	20,00	33,32	30,82	30,82	100,00	20,00	84,14	86,48
2	18	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Mesin Absensi	2	0	1	1	0,00	1	2	100,00
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang disediakan	278	73	54	54	0,00	54	181	65,11
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	18	12	3	3	100,00	3	18	100,00
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	55	27	5	5	0,00	5	37	67,27
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33	0	1	1	0,00	32	33	100,00
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Umum SKPD	4.047,00	69,32	26,38	25,49	96,61	89	183,81	613,74

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	109	68	7	7	100,00	24	99	90,83
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	194	143	13	12	92,31	37	192	98,97
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3744	2724	19	17	89,47	28	2.769	73,96
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	77	60	5	5	100,00	2.750	2.815	3655,84
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan	3.902	3.331	736	546	74,18	736	4.613	118,22
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	623	372	182	182	100,00	121	675	108,38
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah meter lari arsip yang dikelola	12	0	6	6	0,00	12	18	150,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	180,00	51,84	22,65	22,65	100,00	63,00	137,49	76,38
2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibeli	3	0	0	0	0,00	1	1	33,33
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	184	73	69	69	0,00	55	197	107,07
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	122	104	9	9	100,00	7	120	98,36
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Jasa Penunjang Urusan SKPD	3,00	59,28	15,71	12,80	81,53	3,00	75,08	2502,80
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	17.657	9.607	2.187	712	32,56	3.506	13.825	78,30
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi/SDA dan listrik	84	56	12	12	100,00	12	80	95,24
2	18	0	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Kerja Non ASN	67	55	10	10	100,00	17	82	122,39

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
		1				Kantor	Yang Disediakan								
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	100,00	82,55	13,22	13,22	100,00	100,00	195,77	195,77
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	182	124	16	16	100,00	35	175	96,15
2	18	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan mebeleur	6	4	0	0	0,00	85	89	1483,33
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	428	291	20	20	100,00	61	372	86,92
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasa bangunan gedung yang dipelihara	6.015,60	2.662,40	1.666,60	1666,60	100,00	1666,60	5.995,60	99,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100				
	Operasional UPTD	20	10	5	5	100,00	15	30	150,00	20				
	<u>URUSAN PENANAMAN MODAL</u>													
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 6.354.607.455.888	Rp 7.451.053.394.894	Rp 481.620.593.307	Rp 3.693.019.966.561	766,79	Rp 529.782.652.638	Rp 11.673.856.014.093	183,71	Rp 6.354.607.455.888
2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0,00	5	5	100,00	5

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	0	0,00	1	1	100,00
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	5	0	0	0	0,00	5	5	100,00
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Potensi Investasi	7	5	1	16,67	1666,67	3	25	352,38
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	0	0	0	0,00	2	2	100,00
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	1	5	2	2	100,00	1	8	800,00
2	18	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Jumlah Pengusaha Yang	44.900	20.211	6.827	9.606	140,71	6.173	35.990	80,16

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
		3				MODAL	Berinvestasi								
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor Yang Berkonsultasi Potensi Investasi	44.900	20.211	6.827	9.606	140,71	6.173	35.990	80,16
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	3	0	0	0	0,00	1	1	33,33
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	8	6	1	1	100,00	4	11	137,50
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan	7.512	27.980	7.512	14.893	198,26	6.173	49.046	652,90
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	100,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	99,83

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Berkas Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	37.669	27.980	5.206	9.606	184,52	5.958	43.544	115,60
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	37.669	27.980	4.993	9.606	192,39	22	37.608	99,84
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	69	60	9	9	100,00	10	79	114,49
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	5	0	0	0	0,00	5	5	100,00
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Beroperasi	44.900	20.211	6.827	9.606	140,71	5.958	35.775	79,68

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100	
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berizin dan Beroperasi Sesuai Dengan Perizinan Yang Dimiliki	44.900	20.211	6.827	9.606	140,71	5.958	35.775	79,68
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	127	80	7	7	100,00	8	95	74,80
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	456	240	216	216	100,00	238	694	152,19
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	426	219	13	13	100,00	14	246	57,75
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Yang Terbangun	85	7	1	1	100,00	85	93	109,41

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten	100	7	1	1	100,00	100	108	108,00
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi	557	319	54	54	100,00	5	378	67,86
						URUSAN KETENAGA KERJAAN									
2	7	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	4,30	3,02	3,01	3,00	100	3,85	3,29	77
2	7	3	2	1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	523	367	77	70	91	81	608	99

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	7	3	2	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	100	97	100	95	95	80	90,67	91
2	7	3	2	3		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	268	167	38	35	92	40	242	94
2	7	3	2	4		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	22,5	12,5	3,0	3,0	100	3	6,17	27
2	7	3	2	5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	12,78	0	0	0	0	2,5	0,83	7
2	7	4				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	77,31	58,41	74,31	74,20	100	74,91	69,17	89
2	7	4	2	1		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	43,06	40,06	39,46	39,40	100	40,66	40,04	93

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	7	4	2	2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	9	0	0	0	0	0,6	0,6	7
2	7	4	2	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	82,4	0	0	0	0	80	26,67	32
2	7	4	2	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani	100	0	0	0	0	80	26,67	27
2	7	4	2	5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	90	0	0	0	0	80	26,67	30
2	7	4			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	100	76,67	100	78,23	78	100	84,97	85
2	7	4	2	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	147	0	0	0	0	25	25	17

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 *)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11=(10/4)*100
2	7	4	2	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	97,24	0	0	0	0	80	26,67	27
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	90	0	0	0	0	80	26,67	30
3	32	3	2	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	15	10	2	0	0	3	13	87

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Kepala Seksi, dan tiga (tiga) Kepala Sub Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha; dan
 3. Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
 1. Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin;
 2. Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen; dan
 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.
- g. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
- h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, membawahi :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;

- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian,
- (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan,sebagaimana
- (3) Sub Bagian Keuangan,

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dibantu oleh :

- (1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha,
- (3) Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal,

BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian penanaman modal.
- (2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengendalian penanaman modal;

- b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dibantu oleh :

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal,
- (3) Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dibantu oleh :

- (1) Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin,

- (2) Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen,
- (3) Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan,

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan sistem informasi;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi dibantu oleh :

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja,
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga Kerja,

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh :

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- (2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- (3) Seksi Informasi Pasar Kerja,

BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

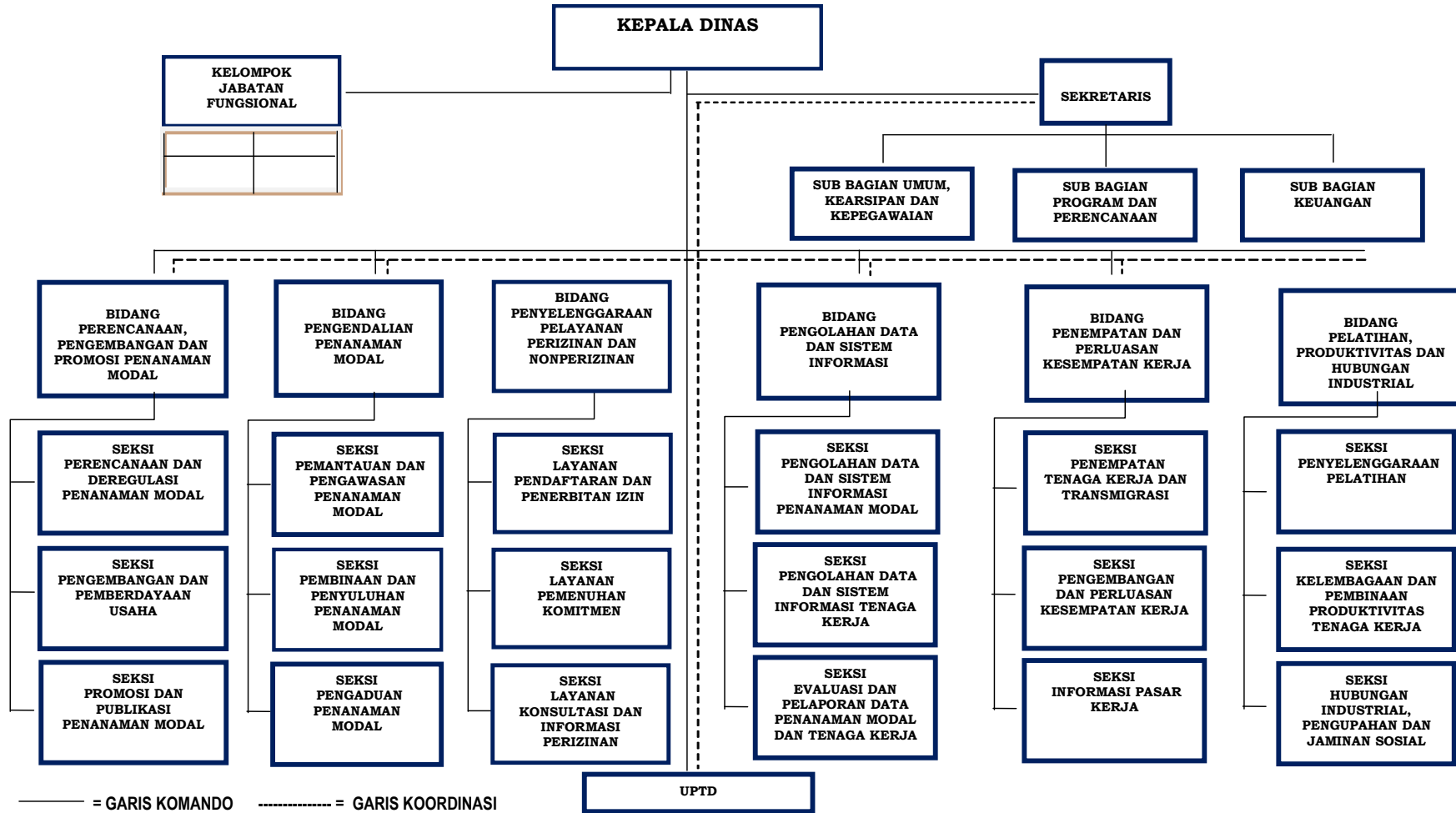
- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial dibantu oleh :

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan,

- (2). Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja,
- (3) Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial

**STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6 (enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 3 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon III-B
4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala Bidang setara Eselon III-B
2. 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala Seksi setara Eselon IV-A.

Pencapaian Kinerja dapat disajikan seperti pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
					Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00			33,41	20,00			
2	1 8 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00			14,67	20,00			
2	1 8 0 1	2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu					20,00	20,00			
2	1 8 0 1	2 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan				4	4	4	4	4
2	1 8 0 1	2 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan				4	4	4	4	4
2	1 8 0 1	2 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan				4	4	4	4	4
2	1 8 0 1	2 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah				4	4	0	4	4
2	1 8 0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Keuangan Tepat Waktu				20,00	20,00			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32	32			72	32			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			12	12			12	12			
2	1	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,00	20,00			4,00	20,00			
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	1			0	1			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	54			0	54			
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3	3			3	3			
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	10			0	5			
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0			0	0			
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			20,00	20			17,14	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20	20			20	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34	34			34	34			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13	13			11	13			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						jumlah makan dan minum yang disediakan			220	245				245			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5	5			5	5			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			565	739			565	739			
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106	257			102	257			
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	6			0	6			
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20,00	20			6,70	20			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel			0	50			0	50			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31	16			30	16			
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,00	20			19,85	20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.988	3.187			2.943	3.187			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12			12	12			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16	17			16	17			
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20	20			15	20			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33	32			32	32			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			92	92			91	92			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			213,9	1.668,60			213,9	1.668,60			
						Operasional UPTD			5	5			5	5			
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,00	20,00			20,00	20,00	
											20,00	20,00			20,00	20,00	
2	1	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14	14			13	13	
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	2			2	2	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	4			4	4	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2 1 8 0 1 2 0 1 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah					4	4			4	4					
2 1 8 0 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah					12	12			12	12					
2 1 8 0 1 2 0 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya					72	72			72	72					
2 1 8 0 1 2 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran yang tersusun					12	12			12	12					
2 1 8 0 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah					14	14			14	14					
2 1 8 0 1 2 0 5 0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan					1	1			1	1					
2 1 8 0 1 2 0 5 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN					72	72			72	72					
2 1 8 0 1 2 0 5 0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu					2	2			2	2					
2 1 8 0 1 2 0 5 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi					5	5			5	5					
2 1 8 0 1 2 0 5 0 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis					72	72			72	72					
2 1 8 0 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah					7	7			7	7					
2 1 8 0 1 2 0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik					24	26			24	26					

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Bangunan Kantor											
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37	41			37	41		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14	16			14	16		
										270	296			270	296		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5	6			5	6		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7	8			7	8		
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121	133			121	133		
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6	7			6	7		
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3	3			3	3		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel				55	61			55	61		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18	19			18	19		
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	3			3	3		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.187	3.506			3.187	3.506	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 153.257.114	Rp 168.582.825			Rp 153.257.114	Rp 168.582.825	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					78	78			78	78	
2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35	35			35	35	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel					30	33			30	33	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33	36			33	36	
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.668,60	1.835,46			1.668,60	1.835,46	
						Operasional UPTD					5	6			5	6	
						URUSAN PENANAMAN MODAL											
2	1	0	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Rp 465.381.741.065	Rp 481.620.593.307			Rp 1.948.131.251.836	Rp 481.620.593.307	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2	2			2	2			
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			0	0			0	0			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			2	2			2	2			
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	3	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	3	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			0	0			0	0			
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1	1			1	1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0						4.958	5.131			14.893	5.131			
2	1	0	2	0	1			100,00	100,00			99,57	100,00			
2	1	0	2	0	0			4.958	5.131			14.893	5.131			
2	1	0	2	0	0			20	20			20	20			
2	1	0	2	0	0			10	10			8	10			
2	1	0	2	0	0			0	0			0	0			
2	1	0						6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	2	0	1			6.827	6.827			5.754	6.827			
2	1	0	2	0	0			30	7			30	7			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			40	216			0	216			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			32	13			32	13			
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			1	1			1	1			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	1			1	1			
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			63	63			56	63			
						URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU											
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					10,00	10,00			10,00	10,00	
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang					5	6			5	6	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
					Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
2	1 8 2	2	0 1 1				1	1			1	1	
2	1 8 2	2	0 1 2				5	6			5	6	
2	1 8 2	0 2	2	0 2			3	3			3	3	
2	1 8 2	0 2	2	0 2 1			2	2			2	2	
2	1 8 2	0 2	2	0 2 2			1	1			1	1	
2	1 8 3	0 3					3,55	3,61			3,55	3,61	
2	1 8 3	0 3	2	0 1			5	5			5	5	
2	1 8 3	0 3	2	0 1 1			1	1			1	1	
2	1 8 3	0 3	2	0 1 2			4	4			4	4	
2	1 8 3	0 3					3,55	3,61			3,55	3,61	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN				SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)		Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
84						PENANAMAN MODAL	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)																	
2184201						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan																	
21842011						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif																	
21842012						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha																	
21842013						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti																	
21842014						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
2185						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi																	
2185201						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan																	
21852011						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau																	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN				SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14				
2180200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal						238	261			238	261			
2180203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						14	16			14	16			
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						85,00	87,00			85,00	87,00			
21806201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu						100,00	100,00			100,00	100,00			
218062011	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan						5	5			5	5			
21015	URUSAN KETENAGAKERJAAN																			
21015	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					<i>Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja</i>														
210151	Penyebaran Informasi Pasar Kerja					Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja						600	750			203	750			

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
									Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	1	0	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina			10	20			10	20			
2	1	0	1	6	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi											
	1	0	1	0	Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati			7	2			0	2			
2	1	0	1	7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja											
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan			32	20			32	20			
2	1	0	1	0	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif			80	85			55	85			
2	1	0	1	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan			30	38			30	38			
2	1	0	1	8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak			100	100			100	100			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210182	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan			40	40			40	40			
210183	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun			5	5			2	5			
21019	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)											
210191	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			1	0			1	0			
210192	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan			1	0			1	0			
210195	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			20	20			20	20			
210196	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan			20	20			25	20			
210197	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0			0	0			
210198	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok	Jumlah Bantuan Peralatan Las Listrik yang			0	0			0	0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masyarakat di Bidang Las Listrik	diberikan/dihibahkan											
2 1 0 1 1 3	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			25	50			25	50			
2 1 0 1 1 7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			3	0			3	0			
2 1 0 1 2 4	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	1			0	1			
2 1 0 1 2 5	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif	Jumlah Bantuan Peralatan Otomotif yang diberikan/dihibahkan			0	0			0	0			
2 1 0 1 2 7	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyuluhan Kerja	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0			0	0			
2 1 0 1 2 8	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Peserta Pelatihan yang terdidik			40	40			40	40			
2 1 0 1 3 1	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Bantuan Peralatan yang diberikan/dihibahkan			40	40			40	40			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	1	3		Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan			1	0			1	0			
2	1	0	2			Program Pelatihan Keterampilan Kerja											
2	1	0	2	0	1	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat			25	50			25	50			
						URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU											
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					82,00	82,50			82,00	82,50	
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					2	2			2	2	
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					1	1			1	1	
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					1	1			1	1	
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3,85	4,94			3,85	4,94	
2	0	0	2	0		Pelaksanaan Pelatihan					81	85			81	85	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
731	berdasarkan Unit Kompetensi															
2073200	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					dilatih dan mendapatkan sertifikat										
2073201	Jumlah peserta yang dilatih									81	85			81	85	
2073202	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
2073202	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									2	2			2	2	
2073203	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					Jumlah unit/paket sarana yang disediakan										
2073203	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan									5	6			5	6	
2073202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi										
2073202	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi									80,00	85,00			80,00	85,00	
2073202	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta															
2073202	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta									40	42			40	42	
2073203	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran										
2073203	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran									40	42			40	42	
2073203	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi					Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja										
2073203	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja									80	85			80	85	
2073204	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil										
2073204	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil									3,00	3,50			3,00	3,50	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 0 2 0 0 7 3 2 4 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan					80	82			80	82	
2 0 0 2 0 7 3 2 5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten					2,50	2,50			2,50	2,50	
2 0 0 2 0 0 7 3 2 5 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					82,50	85,00			82,50	85,00	
2 0 0 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan					74,91	75,51			74,91	75,51	
2 0 0 2 0 7 4 2 1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja					40,66	41,26			40,66	41,26	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja					20	20			20	20	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 2	Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja					97,53	98,03			97,53	98,03	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					40	44			40	44	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani					10	11			10	11	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar					750	825			750	825	
2 0 0 2 0 7 4 2 2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)					0,60	1,20			0,60	1,20	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi					20,00	20,00			20,00	20,00	
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS					10	11			10	11	
2	0	0	2	0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					80,00	80,60			80,00	80,60	
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					4	4			4	4	
2	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					788	827			788	827	
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja					50	55			50	55	
2	0	0	2	0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					80,00	85,00			80,00	85,00	
2	0	0	2	0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					63	66			63	66	
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					20,00	20,00			20,00	20,00	
2	0	0	2	0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					20	22			20	22	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 4 2 0 5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya					80,00	82,50			80,00	82,50	
2 0 7 4 2 0 0 5 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja					5	5			5	5	
2 0 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan					100,00	100,00			100,00	100,00	
2 0 7 5 2 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB					25	27			25	27	
2 0 7 5 2 0 0 1 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit					20	22			20	22	
2 0 7 5 2 0 0 1 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan					Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat					5	5			5	5	
2 0 7 5 2 0 0 1 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguipahan					Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan					4.739	4.976			4.739	4.976	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan					80,00	84,00			80,00	84,00	
2 0 7 5 2 0 2 0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan					5	5			5	5	
2 0 7 5 2 0 2 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI					0,75	1,35			0,75	1,35	
2 0 7 5 2 0 2 0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi					21	22			21	22	
2 0 7 5 2 0 2 0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah					Jumlah ketenagan bekerja					21	22			21	22	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)							INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)		Tahun 2024 (tahun n+1)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kabupaten/Kota											
2	0	0	2	0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					30,60	31,20			30,60	31,20	
3	3	0				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya				80,00	82,50			80,00	82,50	
3	3	0	2	0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi				3	3			3	3	
3	3	0	2	0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan				4	6			4	6	
3	3	0	2	0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi				2	3			2	3	
3	3	0	2	0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi				2	3			2	3	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas pokok DPMPTSP&NAKER adalah **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja**. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.

- s. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:
- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peleuang/proyek investasi dan potensi perizinan.
 - b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peleuang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
 - c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
 - d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
 - e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
 - f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
 - g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
 - h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
 - i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
 - j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
 - k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
 - l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
 - m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
 - n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS).
 - o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
 - p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
 - q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.

- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2022-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2021 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2021, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2023 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.248.851.220	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.589.597.465	
	BELANJA RUTIN				13.058.120.300					8.094.217.789	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	13.058.120.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	20,00	8.094.217.789	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00		
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penangganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	126.034.416	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penangganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11	5.019.100	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	3	3.308.800	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	720.800	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5.034.416	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	989.500	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	91	88.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	20	10.446.841.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1	7.272.547.841	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	10.435.841.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	7.272.547.841	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	0	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	20	58.335.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	0	0	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1	7.700.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	0	0	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	0	0	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat	3	16.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			waktu					waktu			
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	6	23.135.200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0	0	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah peserta bimbingan teknis	32	11.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah peserta bimbingan teknis	0	0	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	96	733.975.512	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	176	137.098.600	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	20.429.707	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.481.900	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	100.474.623	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2.385.450	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	209.134.384	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	20.112.900	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3				jumlah makan dan minum yang disediakan	3		
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.025	21.650.418	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.837.000	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	113.099.290	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	45.752.000	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	126	172.445.208	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	126	52.172.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	96.741.882	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	1.357.350	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	70	500.058.543	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	0	0	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	0	0	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	61	151.884.137	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	98.174.406	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	0	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	640.707.837	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	574.422.199	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.846	4.373.235	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	1.798.000	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	324.574.879	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	134.649.459	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81	311.759.723	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81	437.974.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	187	436.087.980	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	187	105.130.049	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	134.835.690	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	40.900.000	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	86	31.358.181	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	0	0	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	36.559.410	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	26.180.000	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	233.334.699	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	38.050.049	
A.8	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	5	116.079.810	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	0	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.546.606.991	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.331.941.526	
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.546.606.991	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.331.941.526	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	279.936.892	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	0	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5	110.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	0	0	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	55.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	6	55.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	0	0	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	169.936.892	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	0	0	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	83.838.810	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	0	0	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1	86.098.082	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	0	0	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,61	170.528.415	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,61	320.848.190	
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	170.528.415	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	2	320.848.190	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	1	50.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	0	0	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	120.528.415	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	320.848.190	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,61	756.761.247	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,61	547.945.456	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.173	756.761.247	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.173	547.945.456	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6.173	672.252.562	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6.173	494.700.311	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24	50.028.800	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24	44.176.235	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	11	6.979.885	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	11	9.068.920	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	27.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	88%	312.829.770	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	88%	366.718.380	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.173	312.829.770	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.173	366.718.380	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasida Sinkronisasi Pemantaua Pelaksanaan Penanamar Modal	8	61.252.620	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasidan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35	58.433.550	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaa Pelaksanaan Penanamar Modal	261	137.493.510	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240	196.699.230	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	16	114.083.640	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	101	111.585.600	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	87	26.550.667	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	87	96.429.500	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100	26.550.667	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100	96.429.500	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	26.550.667	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	96.429.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				17.644.123.929	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				1.163.438.150	
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				17.644.123.929	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				1.163.438.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	82,5	100.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	0	0	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	100.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0	0	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	0	0	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4,94	1.160.994.902	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4,94	364.442.050	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	85	931.963.331	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	85	312.940.400	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	87	799.963.331	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80	312.940.400	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	22.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	6	110.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	0	0	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	85	55.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	42	10.019.300	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	85	55.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	42	10.019.300	
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	40	50.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	0	0	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	80,00	50.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	69.031.571	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	41.482.350	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	82	69.031.571	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	82	41.482.350	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,50	55.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	85	55.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	75,51	15.829.361.464	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	75,51	148.567.460	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,26	15.347.596.500	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20	12.414.307.500	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	0	0	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	98,03	11.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	0	0	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	44	22.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	0	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	11	22.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	0	0	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	825	2.878.289.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	0	0	
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1,2	66.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0	0	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	20	55.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	0	0	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11	11.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	0	0	
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,6	280.687.410	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,6	113.567.590	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	4	44.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	0	0	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	827	99.187.410	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	750	27.689.640	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui	55	137.500.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui	55	85.877.950	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			JobFair/Bursa Kerja					JobFair/Bursa Kerja			
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	85	124.077.554	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	85	34.999.870	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	66	47.077.554	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	45	34.999.870	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20	55.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	0	0	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	22	22.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	0	0	
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	82,5	11.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	0	0	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	0	0	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	406.748.523	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	635.428.840	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	27	149.458.551	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	27	52.804.900	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berkaitan dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar W/LKP Online	22	63.924.371	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar W/LKP Online	22	52.804.900	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	5	22.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	0	0	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.976	63.534.180	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	0	0	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	84	257.289.972	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	84	582.623.940	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5	63.958.491	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	0	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	1,35	22.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	0	0	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	22	22.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	0	0	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	22	127.331.481	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	22	82.343.940	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	31,2	22.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.794	500.280.000	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	82,5	147.019.040	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	82,5	14.999.800	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	147.019.040	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	1	14.999.800	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	70.019.040	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	24	14.999.800	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	3	22.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	0	0	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	3	55.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	0	0	
JUMLAH PAGU INDIKATIF					32.842.851.220	JUMLAH KEBUTUHAN DANA					10.589.597.465

2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C.32 berikut ini.

Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BELANJA RUTIN				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	20,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	72	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	14	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	0	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	3	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	6	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Junmlah peserta bimbingan teknis	32	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	7	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	25	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	39	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	32	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3.025	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	126	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	jumlah arsip yang dikelola	12	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang yang diadakan	70	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah mebel yang diadakan	61	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	3	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah jasa pengantar surat	3.846	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rp 324.574.879,00	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	78	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Pemeliharaan Mebel	86	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	
A.8	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional yang ada di UPTD	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	6	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya PERKADA RUPMD	2	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,55	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	1	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	4	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,61	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.173	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	6.173	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	24	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	11	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	88%	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.173	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	8	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	261	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	16	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	87	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	82,5	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4,94	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	85	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah peserta yang dilatih	87	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	6	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	85	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	85	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	40	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	80,00	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	3,00	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	82	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	85	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	75,51	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,26	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Persentase tingkat kesempatan kerja	98,03	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	44	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	11	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	825	
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1,2	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	20	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11	
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,6	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Updating sistem informasi Pasar Kerja	4	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	827	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan peserta job fair	55	
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	85	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	66	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	22	
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	82,5	
III.5..1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	27	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	22	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	5	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.976	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	84	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	5	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	1,35	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	22	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah ketenagan bekerja	22	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Jumlah pekerja dan buruh yang diikuti menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	5.000	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	82,5	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	6	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	3	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP pada 2023 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2023, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2023 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2023, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 *Smelter*, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, *Food Estate*, Energi Terbarukan, *Major Project* di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan daya tarik Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan pelayanan penanaman modal
		1 Terwujudnya Iklim Penanaman Modal	1.1 Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
		2 Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Tepat Sasaran	2.1 Persentase Peningkatan Jumlah Investor
			2.2 Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi Investasi
		3 Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal	3.1 Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi
		4 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Sesuai SOP dan SPP	4.1 Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Baik	5.1 Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya Kesempatan Berusaha
		1 Terciptanya Tenaga Kerja yang Berkopetensi	1.1 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja
			1.2 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan
		2 Terciptanya Hubungan Industrial yang kondusif	2.1 Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Pengadilan H.I
		3 Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS, Bipatrit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3.1 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS, Bipatrit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks RB

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2023.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik..

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C. 33 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			10.589.597.465				35.494.670.328	
	BELANJA RUTIN			8.094.217.789				8.903.639.568	
2	181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00	8.094.217.789			20,00	8.903.639.568
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00				20,00	-
2	18121 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggran dan evaulasi kinerja perangkat daerah		14	5.019.100			14	5.521.010
2	181211 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	3	3.308.800	APBD		4	3.639.680
2	181212 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	4	720.800	APBD		2	792.880

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	4	989.500	APBD		4	1.088.450
2	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		12	7.272.547.841			12	7.999.802.625
2	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Kab. Sumenep	72	7.272.547.841	APBD		72	7.999.802.625
2	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah		0	0			0	0
2	1	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	8	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		176	137.098.600			190	150.808.460
2	1	8	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	4.481.900	APBD		6	4.930.090
2	1	8	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	2.385.450	APBD		6	2.623.995
2	1	8	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	10	20.112.900	APBD		10	22.124.190
								jumlah makan dan minum yang disediakan	Kab. Sumenep	3				3	
2	1	8	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	10.837.000	APBD		12	11.920.700
2	1	8	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sumenep	1	45.752.000	APBD		1	50.327.200
2	1	8	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	126	52.172.000	APBD		139	57.389.200
2	1	8	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	12	1.357.350	APBD		13	1.493.085

Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan		0	0			0	0	
2	1	8	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	8	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	8	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	8	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan		3	574.422.199			3	631.864.419
2	1	8	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	1.000	1.798.000	APBD		1.000	1.977.800
2	1	8	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Kab. Sumenep	12	134.649.459	APBD		12	148.114.405
2	1	8	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	Kab. Sumenep	81	437.974.740	APBD		81	481.772.214
2	1	8	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara		187	105.130.049			187	115.643.054
2	1	8	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	36	40.900.000	APBD		36	44.990.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	1	8	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sumenep	63	26.180.000	APBD		63	28.798.000
2	1	8	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Sumenep	3	38.050.049	APBD		3	41.855.054
							Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
							URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.331.941.526				1.465.135.679
2	1	8	0	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		0	0			0	0
2	1	8	0	2	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		0	0		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 2 2 0 1 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2 1 8 2 2 0 1 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2 1 8 2 2 0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha		0	0			0	0
2 1 8 2 2 0 2 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2 1 8 2 2 0 2 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2 1 8 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		3,61	320.848.190			3,61	352.933.009
2 1 8 3 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal		2	320.848.190			5	352.933.009
2 1 8 3 2 0 1 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	0	0	APBD		1	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	Kab. Sumenep	2	320.848.190	APBD		4	352.933.009
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)		3,61	547.945.456			3,61	602.740.002
2	1	0	2	0		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan		6.173	547.945.456			6.173	602.740.002
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	Kab. Sumenep	6.173	494.700.311	APBD		6.173	544.170.342
2	1	0	2	0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Kab. Sumenep	24	44.176.225	APBD		24	48.593.848
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Kab. Sumenep	11	9.068.920	APBD		11	9.975.812
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi		88%	366.718.380			6.173	403.390.218
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan		6.173	366.718.380			6.173	403.390.218
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Kab. Sumenep	35	58.433.550	DAK Non Fisik		8	64.276.905
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	240	196.699.230	DAK Non Fisik		261	216.369.153
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	101	111.585.600	DAK Non Fisik		16	122.744.160
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		87	96.429.500			87,00	106.072.450
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		100	96.429.500			100,00	106.072.450
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	Kab. Sumenep	4	96.429.500	APBD		4	106.072.450

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
20732002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
20732013	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2073202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi		42	10.019.300			85,00	11.021.230
20732021	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Kab. Sumenep	42	10.019.300	APBD		42	11.021.230
2073203	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran		40	0			42	0
20732031	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	80	0	APBD		85	0
2073204	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil		3	41.482.350			3,50	45.630.585
20732041	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	Kab. Sumenep	82	41.482.350	APBD		82	45.630.585
2073205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten		0	0			0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		75,51	148.567.460			75,51	163.424.206
2	0	0	2	0	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja		0	0			0	0
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		0	0			0	0
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		80,6	113.567.590			80,60	124.924.349
2	0	0	2	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	
2	0	0	2	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	Kab. Sumenep	750	27.689.640	APBD		827	30.458.604
2	0	0	2	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair		55	85.877.950	APBD		55	94.465.745
2	0	0	2	0	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani		85	34.999.870			85,00	38.499.857
2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	Kab. Sumenep	45	34.999.870	APBD		66	38.499.857
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya		0	0			0	0
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		100	635.428.840			100	698.971.724
2	0	0	2	0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB		27	52.804.900			27	58.085.390
2	0	0	2	0	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	Kab. Sumenep	22	52.804.900	APBD		22	58.085.390
2	0	0	2	0	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan		84	582.623.940			84	640.886.334
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2	0	0	2	0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 0 7 5 2 0 2 0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
2 0 7 5 2 0 2 0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	Kab. Sumenep	22	82.343.940	APBD		22	90.578.334
2 0 7 5 2 0 2 0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Kab. Sumenep	3.794	500.280.000	APBD		31,20	550.308.000
3 3 2 0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya		82,5	14.999.800			82,50	16.499.780
3 3 2 0 3 2 0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi		1	14.999.800			1	16.499.780
3 3 2 0 3 2 0 1 0 4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Kab. Sumenep	24	14.999.800	APBD		24	16.499.780
3 3 2 0 3 2 0 1 0 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0
3 3 2 0 3 2 0 1 0 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		0	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2022-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2023.

Tabel 4.1
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				BELANJA RUTIN		11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	114.559.96 8	126.015.96 5	138.617.56 1	152.479.31 7	167.727.24 9	184.499.97 4
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4.559.968	5.015.965	5.517.561	6.069.317	6.676.249	7.343.874
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.00 0	117.128.00 0	128.840.80 0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9.263.115. 260	10.189.426 .786	11.208.369 .465	12.329.206. 411	13.562.127 .053	14.918.339 .758
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	9.253.115.2 60	10.178.426. 786	11.196.269. 465	12.315.896. 411	13.547.486. 053	14.902.234. 658
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	194.435.680	213.879.248	235.267.173	258.793.890	284.673.279	313.140.607
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.317.000	10.248.700	11.273.570
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	141.403.680	155.544.048	171.098.453	188.208.298	207.029.128	227.732.041
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	24.157.650
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.032.000	23.135.200	25.448.720	27.993.592	30.792.951	33.872.246
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	645.355.189	709.890.708	780.879.779	858.967.757	944.864.532	1.039.350.985
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17.900.043	19.690.047	21.659.052	23.824.957	26.207.453	28.828.198
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87.552.609	96.307.870	105.938.657	116.532.523	128.185.775	141.004.352
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	182.639.781	200.903.759	220.994.135	243.093.549	267.402.903	294.143.194
					jumlah makan dan minum yang disediakan						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	19.196.246	21.115.871	23.227.458	25.550.203	28.105.224	30.915.746
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan	100.261.400	110.287.540	121.316.294	133.447.923	146.792.716	161.471.987

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					yang disediakan						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	151.051.30 0	166.156.43 0	182.772.07 3	201.049.28 0	221.154.20 8	243.269.62 9
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	86.753.810	95.429.191	104.972.11 0	115.469.32 1	127.016.25 3	139.717.87 9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan	475.082.23 1	522.590.45 4	547.349.50 0	574.584.45 0	604.542.89 5	637.497.18 4
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	250.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	138.076.48 8	151.884.13 7	167.072.55 0	183.779.80 6	202.157.78 6	222.373.56 5
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	87.005.743	95.706.318	105.276.94 9	115.804.64 4	127.385.10 9	140.123.61 9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	570.448.25 4	627.493.08 0	690.242.38 8	759.266.62 7	835.193.28 9	918.712.61 8
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	3.929.485	4.322.434	4.754.677	5.230.145	5.753.159	6.328.475
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	289.568.71 3	318.525.58 5	350.378.14 3	385.415.95 8	423.957.55 3	466.353.30 9
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	276.950.05 6	304.645.06 2	335.109.56 8	368.620.52 5	405.482.57 7	446.030.83 5
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	401.216.33 1	441.337.96 4	485.471.76 1	534.018.93 7	587.420.83 0	646.162.91 3

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.125.600	131.038.160	144.141.976	158.556.174	174.411.791	191.852.970
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	27.485.375	30.233.913	33.257.304	36.583.034	40.241.338	44.265.471
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32.140.400	35.354.440	38.889.884	42.778.872	47.056.760	51.762.436
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	222.464.956	244.711.452	269.182.597	296.100.856	325.710.942	358.282.036
				Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	116.079.810	127.687.791	140.456.570	154.502.227	169.952.450	186.947.695
				URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU		1.436.742.027	1.908.163.667	2.098.980.034	2.308.878.037	2.539.765.841	2.793.742.425
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Meningkatkan daya tarik Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	259.571.286	285.528.415	314.081.256	345.489.382	380.038.320	418.042.152
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	159.571.286	175.528.415	193.081.256	212.389.382	233.628.320	256.991.152
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	109.571.286	120.528.415	132.581.256	145.839.382	160.423.320	176.465.652
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248
Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	687.964.771	1.084.508.685	1.192.959.554	1.312.255.509	1.443.481.060	1.587.829.166

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	687.964.771	1.084.508.685	1.192.959.554	1.312.255.509	1.443.481.060	1.587.829.166
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	611.138.693	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	45.480.728	50.028.800	55.031.680	60.534.848	66.588.333	73.247.167
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	6.345.350	6.979.885	7.677.874	8.445.661	9.290.227	10.219.250
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	284.390.700	312.829.770	344.112.747	378.524.022	416.376.424	458.014.066
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	284.390.700	312.829.770	344.112.747	378.524.022	416.376.424	458.014.066
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	124.994.10 0	137.493.51 0	151.242.86 1	166.367.14 7	183.003.86 2	201.304.24 8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.712.40 0	114.083.64 0	125.492.00 4	138.041.20 4	151.845.32 5	167.029.85 7
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU		15.403.830 .283	16.944.213 .311	18.638.634 .642	20.502.498. 106	22.552.747 .917	24.808.022 .708
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga Kerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	100.000.00 0	110.000.00 0	121.000.00 0	133.100.00 0	146.410.00 0	161.051.00 0
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.00 0	110.000.00 0	121.000.00 0	133.100.00 0	146.410.00 0	161.051.00 0
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1.035.674.607	1.139.242.068	1.253.166.275	1.378.482.902	1.516.331.192	1.667.964.311
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	815.620.288	897.182.317	986.900.549	1.085.590.603	1.194.149.664	1.313.564.630
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	695.620.288	765.182.317	841.700.549	925.870.603	1.018.457.664	1.120.303.430
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	13.780.096 .925	15.158.106 .617	16.673.917 .279	18.341.309. 007	20.175.439 .908	22.192.983 .899
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	13.347.910 .000	14.682.701 .000	16.150.971 .100	17.766.068. 210	19.542.675 .031	21.496.942 .534
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	10.795.050. 000	11.874.555. 000	13.062.010. 500	14.368.211. 550	15.805.032. 705	17.385.535. 976
				Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2.502.860.0 00	2.753.146.0 00	3.028.460.6 00	3.331.306.6 60	3.664.437.3 26	4.030.881.0 59
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	96.630.600
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	251.249.92₂	276.374.91₄	304.012.40₅	334.413.64₆	367.855.01₁	404.640.51₂
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	86.249.922	94.874.914	104.362.40 ₅	114.798.64 ₆	126.278.51 ₁	138.906.36 ₂
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	125.000.00 ₀	137.500.00 ₀	151.250.00 ₀	166.375.00 ₀	183.012.50 ₀	201.313.75 ₀
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani	110.937.00₃	122.030.70₃	134.233.77₄	147.657.15₁	162.422.86₆	178.665.15₃
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	40.937.003	45.030.703	49.533.774	54.487.151	59.935.866	65.929.453
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	357.172.62₉	392.889.89₁	432.178.88₁	475.396.76₉	522.936.44₅	575.230.09₀

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	130.833.522	143.916.875	158.308.562	174.139.418	191.553.360	210.708.696
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	55.586.409	61.145.050	67.259.555	73.985.511	81.384.062	89.522.468
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	55.247.113	60.771.825	66.849.007	73.533.908	80.887.298	88.976.028
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	226.339.106	248.973.017	273.870.318	301.257.350	331.383.085	364.521.394
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	55.616.079	61.177.687	67.295.456	74.025.001	81.427.502	89.570.252
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	110.723.027	121.795.330	133.974.863	147.372.349	162.109.584	178.320.542
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	60.886.122	66.974.734	73.672.208	81.039.429	89.143.371	98.057.709
				Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
JUMLAH						28.620.865.033	31.810.698.974	34.964.268.872	38.433.195.759	42.249.015.335	46.446.416.868

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

3. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sumenep, Maret 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP

DR. R. ABD. RAHMAN RIYADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125-199503 1 001